

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH JALUR ASPIRASI KOMISI X DPR-RI BAGI
MAHASISWA DI UNIVERSITAS MANDIRI BINA
PRESTASI MEDAN**

TESIS

Oleh:

LIDYA OCTAFIANI BR. SINULINGGA

231801004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/8/25



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH JALUR ASPIRASI KOMISI X DPR-RI BAGI
MAHASISWA DI UNIVERSITAS MANDIRI BINA
PRESTASI MEDAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan**

Oleh:

LIDYA OCTAFIANI BR. SINULINGGA

231801004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH JALUR ASPIRASI KOMISI X DPR-RI BAGI
MAHASISWA DI UNIVERSITAS MANDIRI BINA
PRESTASI MEDAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area – Medan**

Oleh:

LIDYA OCTAFIANI BR. SINULINGGA

231801004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

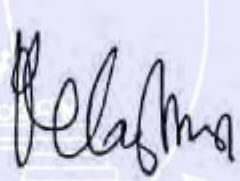
Judul : Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di
Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Nama : Lidya Octafiani Br. Sinulingga
NIM : 231801004

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si


Dr. Beby Masitho Barubara, S.Sos, M.AP

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur


Dr. Yanbar Jamaluddin, M.AP


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

Tanggal Lulus: 25 Maret 2025

Telah diuji pada 25 Maret 2025

Nama : Lidya Octafiani Br. Sinulingga

NPM : 231801004



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

PERNYATAAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di di bawah ini:

Nama : Lidya Octafiani Br, Sinulingga
NPM : 231801004
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X
DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal : 29 April 2025
Yang Menyatakan



Lidya Octafiani Br. Sinulingga

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH JALUR ASPIRASI BAGI MAHASISWA DI UNIVERSITAS MANDIRI BINA PRESTASI MEDAN

Nama : Lidya Octafiani Br. Sinulingga
NPM : 231801004
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan, melalui proses seleksi, distribusi bantuan, serta dampaknya terhadap mahasiswa penerima. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Responden penelitian melibatkan 6 informan (Rektor Universitas, Wakil Rektor II Bagian Kemahasiswaan, Anggota DPR-RI, Biro Kemahasiswaan, mahasiswa penerima KIP Kuliah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KIP Kuliah jalur aspirasi telah membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Proses seleksi dilakukan secara transparan, namun masih terdapat kendala teknis, seperti kurangnya pemahaman mahasiswa tentang prosedur administrasi dan keterlambatan pencairan dana. Selain itu, mahasiswa penerima program menyatakan bahwa bantuan ini memberikan dampak signifikan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga, meningkatkan motivasi belajar, dan mendorong prestasi akademik.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi program kepada mahasiswa baru, perbaikan dalam mekanisme pencairan dana, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, universitas, dan pihak terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, program KIP Kuliah jalur aspirasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi.

Kata Kunci: KIP Kuliah, jalur aspirasi, akses pendidikan tinggi, mahasiswa, Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA SMART CARD PROGRAM (KIP) COLLEGE ASPIRATION PATH FOR STUDENTS IN MANDIRI UNIVERSITY BINA ACHIEVEMENT MEDAN

Nama : Lidya Octafiani Br. Sinulingga
NPM : 231801004
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Pembimbing II : Dr. Beby Masitha Batubara, S.Sos, M.AP

The Indonesia Smart Card (KIP) Lecture Program is a government policy that aims to expand access to higher education for students from underprivileged families. This study aims to analyze the Implementation of the KIP Lecture Program Aspiration Pathway of Commission X DPR-RI at Bina Prestasi Independent University Medan, through the selection process, distribution of assistance, and its impact on recipient students. A descriptive qualitative approach was used with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. The research respondents involved 6 informants (University Rector, Vice Rector II of Student Affairs, Member of DPR-RI, Student Affairs Bureau, KIP Lecture recipient students).

The results showed that the KIP Kuliah program has helped students from low-income families to continue their higher education. The selection process is carried out transparently, but there are still technical obstacles, such as students' lack of understanding of administrative procedures and delays in fund disbursement. In addition, students receiving the program stated that this assistance had a significant impact in reducing the economic burden on families, increasing motivation to learn, and encouraging academic achievement.

This study recommends increased socialization of the program to new students, improvements in the fund disbursement mechanism, and increased coordination between the government, universities, and related parties. With these steps, the Kip Kuliah program is expected to run more optimally and sustainably in supporting equitable access to higher education.

Keywords: KIP Kuliah, aspiration pathway, access to higher education, students, Bina Prestasi Independent University Medan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pencipta dan penguasa seluruh langit, alam semesta, dan bumi. Atas berkat, rahmat, dan kasihNya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang berjudul **"Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan"**, ini merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Magister (Strata 2), jurusan Administrasi Publik, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selama penyusunan tesis ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah saya Alm. Edinta Sinulingga dan Ibu saya Almh. Nurlianna Br Tarigan (yang sudah ada di Surga penulis tetap menyayangi kalian semoga kalian Damai Bersama Bapa di Surga)
2. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS selaku Direktur Fakultas Pascasarjana Universitas Medan Area
5. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Kaprodi Magister Ilmu Administrasi Publik
6. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si selaku dosen Pembimbing 1 yang telah bnyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk, nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan baik
7. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku dosen Pembimbing 2 yang telah bnyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, petunjuk,

✱

nasihat, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sarannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini dengan baik

8. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.I.Pol selaku selaku Sekretaris Ujian Tesis atas segala komentar, kritik dan saran serta mengenai penulisan dalam tesis ini yang bersifat membangun
9. Bapak Dr. Sarman Sinaga, SE.,MM selaku Rektor Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
10. Ibu Dr. Afridayanti Surbakti, S.E.,M.Si selaku Wakil Rektor II Bagian Kemahasiswaan Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
11. Bapak dr. Sofyan Tan selaku Anggota DPR-RI Komisi X yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
12. Bapak Jimmy Perangin-angin, M.Kom selaku Ka.Bag. Humas dan Kemahasiswaan Universitas Mandiri Bina Prestasi yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
13. Maria Meilani Batubara dan Fauzi Pratama Harefa selaku mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan yang telah bersedia memberikan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian
14. Kepada untuk diri sendiri yang sudah mampu mengalahkan ego dalam manajemen waktu ditengah kesibukan lainnya, terima kasih depan diri sendiri yang sudah belajar, bekerja dan berusaha dengan penuh kesabaran dari segala upaya yang harus dikerjakan. Teimakasih sudah berjuang dan tegar karena dibalik itu semua ada cerita indah pada waktunya.
15. Kakak penulis Sabrina Evrita Br Sinulingga, S.Kom, abang ipar penulis Hiskia Andika Bangun dan adik penulis Reza Firmanta Sinulingga yang selalu mendukung, mendoakan dan bersama dengan penulis saat suka maupun duka
16. Teman spesial penulis Gunawan Pinem yang selalu mendukung, mendoakan dan tetap bersama dengan penulis saat suka maupun duka

17. Saudara/I, Sahabat, Adek-adek penerima KIP Kuliah, Keluarga, penulis Friwina Magnesia Surbakti, Nella Mariaty Siregar, Laura Purba, Deriirwansyah, Ibu Juwita, Bapak Hermanto Aritonang, Bapak Jusup Ginting, Bapak Hendri Aritonang, Bapak Pahala Galingging.
18. Seluruh teman-teman spesial penulis Meutia Sri Rezeki, Salsa Rizkya, Fika Nadya Rambe, Farhan Abrar beserta teman-teman Magister Administrasi Publik Stambuk 2023 yang turut serta dalam proses pembuatan penelitian ini baik berupa dukungan, semangat sepanjang periode perkuliahan yang sangat menyenangkan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dari penjelasan tesis dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan berguna bagi setiap orang dan semua pihak yang membacanya serta mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 29 April 2025

Penulis

Lidya Octafiani Br. Sinulingga

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	IV
PERNYATAAN PENELITIAN	VI
HALAMAN PERNYATAAN	VII
ABSTRAK	VIII
ABTRACT	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR TABEL	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Implementasi	19
2.2 Implementasi Kebijakan	22
2.3 Kebijakan Publik	23
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	25
2.5 Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	27
2.5.1 Syarat KIP Kuliah	28
2.5.2 Cara Mendaftar KIP Kuliah	29
2.5.3 Jangka Waktu Pemberian KIP Kuliah	30
2.5.4 Keunggulan KIP Kuliah	30
2.5.5 KIP Kuliah Jalur Aspirasi	31
2.5.6 Rekomendasi Untuk Mendapatkan KIP Kuliah	31
2.6 Penelitian Terdahulu	35
2.7 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian	38
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Informan Penelitian	47
3.5 Metode Analisa Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	59
4.1 Hasil Penelitian	59
4.1.1 Sejarah Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan	59
4.1.2 Visi & Misi Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan	60
4.1.2.1 Visi	60
4.1.2.2 Misi	60
4.1.2.3 Sasaran Strategis	60
4.2 Struktur Organisasi	61
4.2.1 Rektor	61
4.2.2 Wakil Rektor Bidang Akademik	62
4.2.3 Kepala Program Studi	62
4.3 Observasi	63
4.3.1 Proses Pendaftaran & Verifikasi	64
4.3.2 Penggunaan KIP Kuliah Oleh Mahasiswa	64
4.3.3 Tantangan Yang Dihadapi	65
4.3.4 Rekomendasi/Masukan	65
4.4 Pembahasan Penelitian	66
4.4.1 Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Bagi Mahasiswa	66
4.4.1.1 Standar & Sasaran Kebijakan	69
4.4.1.2 Sumber Daya Kebijakan	73
4.4.1.3 Komunikasi Antar Organisasi	78
4.4.1.4 Karakteristik Badan Pelaksana	81
4.4.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi & Politik	83
4.4.1.6 Kecenderungan Badan Pelaksana	85
4.4.1.7 Disposisi atau Sikap Pelaksana	87
4.4.2 Faktor-Faktor Pendukung & Penghambat Dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	90
4.4.2.1 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi KIP Kuliah	91

4.4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi KIP Kuliah	96
BAB V KESIMPULAN & SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN PEDOMAN HASIL WAWANCARA	112
LAMPIRAN DOKUMENTASI	120
LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN MAHASISWA KIP KULIAH	126



DAFTAR GAMBAR

2.8 KERANGKA PEMIKIRAN	46
4.1.1 SEJARAH UNIVERSITAS MANDIRI BINA PRESTASI	74
4.2 STRUKTUR ORGANISASI	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Latar Belakang	18
Tabel 1.1 Latar Belakang	25
Tabel 2.7 Jurnal Peneliti Terdahulu	44





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, masalah utama negara Indonesia adalah kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan yang buruk juga sering dikaitkan dengan kemiskinan. Kondisi ini mungkin menjadi komponen penting yang memperparah kemiskinan. Mereka yang tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan tinggi cenderung memiliki lebih sedikit kesempatan kerja dan mungkin merasa sulit mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka yang tidak menerima pendidikan yang layak cenderung memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan kestabilan ekonomi, sementara mereka yang memiliki akses ke pendidikan tinggi cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dan gaji yang lebih besar, yang dapat membantu orang keluar dari kemiskinan.

Pemerintah sistem dan pembiayaan harus memenuhi tugas penting pendidikan. Semua warga negara berhak atas pendidikan. Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan hak-hak ini untuk semua warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kemudahan, menjamin bahwa pendidikan yang berkualitas tinggi diberikan kepada semua warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan program wajib belajar untuk

mendukung kesetaraan pendidikan di Indonesia. Selain itu, manusia bias belajar melalui pengalaman dan latihan untuk berkembang menjadi makhluk yang semakin dewasa melalui pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah untuk membangun landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan, menumbuhkan dan menanamkan kecerdasan emosi dan spiritual yang mewarnai aktivitas kehidupannya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran, dan menumbuhkan kebiasaan dan berpartisipasi aktif secara teratur untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan aktivitas belajar.

Pemerintah berusaha untuk memastikan setiap siswa di Indonesia mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diberi wewenang untuk menjamin keadilan, keterjangkauan, dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi terkait manfaat kemajuan sosial, kemakmuran, dan kemandirian.

Ada beberapa kaitan antara Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Indonesia dan KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Kerangka hukum yang mengatur sistem pendidikan tinggi Negara ini diberikan oleh undang-undang ini. Salah satu kaitannya adalah dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, disebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

KIP Kuliah adalah salah satu bentuk bantuan tersebut yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 juga menekankan pentingnya aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan tinggi. Salah satu cara untuk membantu siswa yang kurang mampu secara

finansial mengakses pendidikan tinggi adalah dengan menerapkan KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah dapat mendukung peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui KIP Kuliah. KIP Kuliah dapat meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa yang berprestasi namun kurang mampu.

Akibatnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesempatan pendidikan di perguruan tinggi dan mendidik generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi pada pembangunan negara.

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah resmi menggantikan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) pada tahun 2020. Nilainya meningkat sekitar 2,75 persen dari APBN 2019 menjadi Rp2.528,8 triliun. Anggaran sebesar Rp505,8 triliun dialokasikan ke sektor pendidikan untuk beasiswa, perguruan tinggi, penelitian, dan seni budaya. 818 ribu siswa yang berasal dari keluarga miskin akan dilayani oleh KIP Kuliah. Jumlah ini naik 76 persen dari 2019 yang hanya 464 ribu. Selengkapnya dapat ditemukan di

<https://karakterunsulbar.com/2020/01/22/bidikmisi-diganti-jadi-kip-kuliah-berikut-penjelasan-kampus/>.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah melakukan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, serta wajib belajar sembilan tahun. Tujuan dari upaya ini tampaknya lebih pada perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak peduli usia, waktu, atau tempat tinggal, pemerataan pendidikan dilakukan. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberi semua orang kesempatan untuk belajar.

Diharapkan program ini akan menghasilkan generasi yang unggul dan memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar adalah program pemerintah yang dibuat untuk mengatasi masalah ini karena masih banyak siswa yang masih bersekolah tetapi putus sekolah karena masalah biaya.

Pemerintah memberikan beasiswa kepada warhanya yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah karena masalah biaya dan undang-undang yang menyatakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Beasiswa KIP Kuliah adalah program pemerintah yang membantu lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) atau separentan yang memiliki bakat akademik yang kuat tetapi menghadapi kendala keuangan untuk membayar biaya kuliah. Ini berbeda dengan beasiswa yang mengutamakan pemberian selamat atau uang kepada seseorang yang berprestasi.

Namun, beasiswa KIP Kuliah mengharuskan penerimanya untuk mempertahankan prestasi akademik dan lulus tepat waktu. Beasiswa ini memberikan

biaya kuliah tunggal mahasiswa setiap semester dan juga memberikan bantuan biaya hidup setiap semester selama delapan semester.

Tidak diragukan lagi, adanya beasiswa KIP Kuliah membuka peluang lebih banyak bagi warga Negara Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Ini akan memungkinkan semakin banyak orang yang dapat memperoleh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, beasiswa KIP Kuliah ini memantau prestasi akademik penerima juga. Para penerima yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi harus mempertahankan IP minimal 3,00 setiap semester. Mereka yang melanggar peraturan ini akan diberi peringatan dan beasiswa akan dicabut sepenuhnya jika hal ini terjadi lagi. Peraturan ini memastikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa KIP Kuliah terus berprestasi akademik, memastikan bahwa kualitas penerima beasiswa tetap terjaga.

KIP Kuliah Jalur Pemerintah (Reguler) dan KIP Kuliah Jalur Aspirasi berbeda karena yang pertama mengajukan langsung ke pemerintah dengan persetujuan orang tua mahasiswa yang memiliki Kartu KIP, Kartu PKH, dan Kartu KKS. Sementara itu, KIP Kuliah Jalur Aspirasi adalah Program Pemerintah yang diberikan perpanjangan tangan Komisi X oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Dr. Sofyan Tan, anggota dewan, telah mengelola Program KIP Kuliah dari tahun 2014 hingga saat ini. Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan, yang terletak di Blok G. No. 87, Komplek CBD Polonia, Suka Damai, Medan Polonia, dirancang untuk menerima aspirasi masyarakat.

Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan, juga dikenal sebagai Rumah Pemenangan dr. Sofyan Tan, telah beroperasi sejak tahun 2014, ketika bapak dr. Sofyan Tan dilantik

sebagai Anggota DPR-RI Komisi X Periode Pertama. Rumah Aspirasi ini berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan keinginan orang-orang di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 (termasuk Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi).

Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang menerima Program Kartu Indonesi Pintar Kuliah.

Universitas tersebut bekerja sama dengan Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan sejak Tahun 2018.

Berikut data mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2018-2023 di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan.

No	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	11	6	64	77	159	349

Amik Mandiri Bina Prestasi berubah nama menjadi Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan, Surat Keterangan pada tahun 2022. Selain itu, Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan memiliki Surat Perjanjian antara Universitas dan Mahasiswa dengan berbagai persyaratan.

Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan telah berusaha mencapai tujuan program utamanya dengan memberikan kesempatan pendidikan tinggi kepada seluruh siswa kurang mampu. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Temuan lapangan tentang program KIP Kuliah di universitas tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam pelaksanaan program. Salah satu masalah yang terjadi pada tahun 2023 adalah bahwa mahasiswa yang tidak memiliki kartu KIP dapat mendaftar online dan datanya masuk ke daftar calon mahasiswa penerima KIP Kuliah. website <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.

Aspek sosialisasi merupakan masalah yang kedua. Pada tahun 2023, pelaksana KIP Kuliah di Universitas ini akan memberikan sosialisasi kepada Kepala Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) di Sumatera Utara tentang program KIP Kuliah. Kepala sekolah akan kemudian memberikan sosialisasi kepada siswa mereka. Namun, beberapa lembaga pendidikan tidak melakukan sosialisasi kembali kepada siswanya, menyebabkan banyak siswa baru tidak mengetahui program KIP Kuliah.

Penelitian sebelumnya difokuskan pada pengaruh KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) terhadap kemandirian belajar siswa. Kemudian, bagaimana kemandirian belajar mempengaruhi hasil belajar siswa, dengan penekanan pada siswa Pendidikan IPS Angkatan 2019-2021 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana akses ke KIP-K dan kemandirian belajar berhubungan dengan hasil belajar siswa. Variabel psikologis dan pendidikan mungkin termasuk dalam hal ini. Karena penelitian ini dilakukan di UIN Maulana Ibrahim Malang, hasilnya sangat relevan dengan mahasiswa universitas tersebut. Variabel-variabel yang disebutkan di atas, termasuk KIP-K, kemandirian belajar, dan hasil belajar, dilihat dalam penelitian ini dengan cara kuantitatif.

Penelitian sebelumnya memfokuskan pada pelaksanaan KIP-Kuliah di Universitas Riau. Penelitian ini menjelaskan seberapa efektif program ini dalam

membantu siswa menyelesaikan pendidikan tinggi, terutama bagi siswa yang kurang mampu secara finansial.

Penelitian ini lebih berfokus pada proses pelaksanaan program KIP Kuliah dan dampak sosial ekonominya daripada pada kemandirian belajar atau hasil belajar secara langsung. Penelitian ini fokus pada evaluasi program untuk mengetahui apakah program berjalan dengan baik dan membantu siswa yang membutuhkan akses pendidikan. Untuk memahami proses dan dampak pelaksanaan program, penelitian ini mungkin menggunakan pendekatan kualitatif atau campuran.

Penelitian saat ini berfokus pada pelaksanaan KIP Kuliah di Universitas Mandiri Bina Prestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KIP membantu mahasiswa dari segi pendidikan dan keuangan.

Fokus pada program bantuan biaya pendidikan dan mengevaluasi seberapa efektif bantuan tersebut membantu siswa menyelesaikan pendidikan mereka. Penelitian ini lebih menekankan proses implementasi program dan dampak finansial yang diberikan oleh KIP, tetapi tidak memeriksa variabel kemandirian belajar. Pendekatan penelitian ini lebih bersifat evaluatif terkait seberapa efektif program dan dampaknya terhadap siswa.

Perbedaan utamanya adalah Penelitian 1 lebih memfokuskan pada pengaruh KIP-K dan Kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa, dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat variabel-variabel pendidikan.

Penelitian 2 & 3 lebih menekankan pada Implementasi program KIP-Kuliah dan bagaimana program tersebut berjalan di Universitas (evaluasi program).

Penelitian pertama lebih fokus pada dimensi akademik (kemandirian belajar dan hasil belajar), sementara penelitian kedua dan ketiga menekankan evaluasi program dan dampak sosial-ekonomi KIP-K terhadap mahasiswa di universitas tertentu. Perbedaan utama terletak pada subjek dan lokasi penelitian.

Menurut peneliti, penerapan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan merata. Ada banyak cara untuk menjelaskan latar belakang program ini.

Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Banyak lulusan SMA/SMK sederajat yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi mengalami keterbatasan ekonomi. Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi membantu siswa dari keluarga kurang mampu melanjutkan pendidikan mereka tanpa terhambat oleh biaya kuliah. Kebijakan Nasional untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Program ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi unggul dan kompetitif di tingkat global. Dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa berprestasi namun kurang mampu, Indonesia dapat memperbanyak lulusan perguruan tinggi yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Peran Jalur Aspirasi dalam Seleksi Mahasiswa Baru: Beberapa universitas, termasuk Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan, menggunakan jalur aspirasi untuk menjangkau calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik tetapi

mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam jalur seleksi nasional (SNBP/SNBT). Melalui jalur ini, mahasiswa dapat mendapatkan rekomendasi dari lembaga, tokoh masyarakat, atau lembaga tertentu yang menilai mereka layak mendapatkan KIP Kuliah. Universitas memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih siswa, yang memastikan bahwa hanya siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan yang dapat memanfaatkan program ini.

Mengatasi Kendala Ekonomi sebagai Hambatan Pendidikan. Salah satu faktor utama tingginya angka putus kuliah di Indonesia adalah keterbatasan ekonomi. Program KIP Kuliah hadir untuk mengurangi beban biaya pendidikan, termasuk biaya kuliah dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria. Dengan bantuan ini, mahasiswa dapat lebih fokus pada pendidikan mereka tanpa harus mencari pekerjaan tambahan yang bisa menghambat prestasi akademik. Kontribusi Universitas dalam Mendukung Program Pemerintah sebagai sebuah lembaga pendidikan, Universitas Mandiri Bina Prestasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang sama.

Dengan menerapkan program ini, universitas menunjukkan komitmennya untuk mendukung kebijakan pendidikan nasional dan meningkatkan partisipasi siswa di perguruan tinggi. Universitas juga memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan akademik yang lebih inklusif, di mana siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat belajar dan berkembang.

Alasan memilih isu tersebut program KIP Kuliah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mengangkat isu ini penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi program ini berjalan dengan

efektif di tingkat universitas, serta bagaimana program ini memengaruhi kesempatan pendidikan mahasiswa. Dalam konteks Indonesia, akses pendidikan tinggi sering kali terkendala oleh faktor ekonomi. KIP Kuliah memberikan peluang bagi mahasiswa yang kurang mampu, sehingga sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana program ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh mahasiswa di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan. Dengan memilih isu ini, ada kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana program tersebut dilaksanakan di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan. Hal ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak berwenang (Komisi X DPR-RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dsb) dalam memperbaiki implementasi program serupa di seluruh Indonesia. Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI juga berperan penting dalam mendukung program ini, dan mengkaji implementasinya di universitas bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi efektivitas jalur aspirasi tersebut dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi masyarakat.

Memilih Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan sebagai objek penelitian dapat memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini di luar daerah pusat seperti Jakarta. Universitas ini mungkin memiliki karakteristik mahasiswa yang berbeda dibandingkan universitas besar lainnya, sehingga hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih mengenai implementasi KIP Kuliah. Universitas tersebut mungkin memiliki banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka lebih mungkin mendapatkan manfaat dari program KIP Kuliah. Oleh karena itu, universitas ini bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengkaji apakah program tersebut benar-benar berhasil dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi mereka. Memilih universitas di luar kota besar seperti

Medan menunjukkan perhatian terhadap pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga memberikan kesempatan untuk menggali masalah yang mungkin lebih khas di daerah, seperti kurangnya sosialisasi program atau kendala administratif. Universitas tersebut lebih mudah diakses untuk penelitian lapangan atau pengumpulan data yang lebih langsung dari mahasiswa dan pihak universitas terkait. Ini juga memberikan peluang untuk mendapatkan pandangan yang lebih konkret tentang persepsi mahasiswa dan administrasi universitas terhadap program KIP Kuliah.

Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi berasal dari Komisi X DPR-RI, yang merupakan salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Jalur aspirasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, dengan cara mengajukan bantuan atau dukungan melalui berbagai program yang terkait dengan akses pendidikan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. KIP Kuliah Jalur Aspirasi adalah salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Program ini didanai dan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan implementasi yang sering kali melibatkan berbagai lembaga pendidikan tinggi yang bekerjasama dengan Komisi X DPR-RI. Dalam hal ini, jalur aspirasi menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang diterjemahkan dalam bentuk bantuan atau kebijakan yang mendukung mahasiswa.

NAMA KAMPUS YANG MENERIMA SISWA KIP KULIAH TAHUN 2023

NO	NAMA KAMPUS	JUMLAH	KET
1	Universitas Satya Terra Bhinneka	1669	
2	Universitas Mandiri Bina Prestasi	349	
3	Akademi Informatika Dan Komputer Medicom	233	
4	Politeknik Ganesha Medan	226	
5	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya	189	
6	Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia	178	
7	Universitas Katolik Santo Thomas	177	
8	Universitas Prima Indonesia	161	
9	Institut Sains & Teknologi TD Pardede	132	
10	STMIK TIME Medan	103	
11	Sekolah Tinggi Olahraga Dan Kesehatan Bina Guna	102	
12	Universitas Methodist Indonesia Medan	97	
13	Universitas Quality	91	
14	Universitas Sumatera Utara	91	
15	Universitas Negeri Medan	83	
16	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara	76	
17	Politeknik Mandiri Bina Prestasi	74	
18	Akademi Maritim Belawan	48	

19	Akademi Keperawatan Kesdam I/Bukit Barisan Medan	41	
20	Unggulan Cipta Mandiri	36	
21	Universitas Mikroskil	36	
22	Stikes Murni Teguh	35	
23	Politeknik Negeri Medan	25	
24	Stmb Multismart	25	
25	Stikes Sehati	24	
26	Akademi Pariwisata Medan Hotel School	18	
27	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan	13	
28	Univ. Mahkota Tricom Unggul	12	
29	Universitas Syiah Kuala	5	
30	Universitas Malikul saleh Lhokseumawe	4	
31	Universitas Muslim Nusantara Al-wastiyah	4	
32	Universitas Udayana	4	
33	ITERA	3	
34	Politeknik Negeri Media Kreatif	3	
35	Stba Persahabatan Internasional Asia	3	
36	UNIVERSITAS RIAU	3	
37	Universitas Sam Ratulangi	3	
38	Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada	2	
39	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	2	

40	Institut Kesehatan Deli Husada	1	
41	Institut Pertanian Bogor	1	
42	Institut Teknologi Bandung	1	
43	ISI Surakarta	1	
44	ISI Yogyakarta	1	
45	POLITEKNIK NEGERI JEMBER	1	
46	Universitas Brawijaya	1	
47	UNIVERSITAS DIPONEGORO	1	
48	Universitas Gadjah Mada	1	
49	UNIVERSITAS HASANUDDIN	1	
50	UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN	1	
51	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)	1	
52	Universitas Patimura	1	
53	Universitas Samudra	1	
54	UNIVERSITAS TENGKU UMAR	1	
55	UPN Veteran Yogyakarta	1	

Dalam proses implementasi program tersebut mahasiswa yang ingin memperoleh bantuan KIP Kuliah harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti keluarga yang masuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Mahasiswa mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah melalui sistem yang telah disediakan oleh Kemendikbud atau lembaga terkait lainnya. Di beberapa kasus,

universitas juga berperan dalam proses seleksi. Setelah seleksi, dana bantuan KIP Kuliah akan diberikan kepada mahasiswa yang lolos, baik berupa pembiayaan pendidikan atau bantuan biaya hidup. Implementasi kebijakan ini diikuti dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan apakah program berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan.

Adapun seleksi saat pendaftaran KIP Kuliah di Rumah Aspirasi biasa pendaftaran di buka pada bulan 5 (Mei) setiap tahunnya. Calon Mahasiswa akan mendaftar ke Rumah Aspirasi bersama orang tua/Wali agar mendapatkan pengarahan cara mendaftar di link biodata pendaftaran KIP Kuliah dari Rumah Aspirasi setelah itu pihak Rumah Aspirasi akan melakukan seleksi administrasi. Bagi yang lolos administrasi akan dikabari untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu seleksi wawancara yang sudah di tentukan waktu dan tempat ujiannya. Setelah ujian wawancara terlaksana pihak Rumah Aspirasi akan rapat pleno untuk menentukan siapa yang akan layak mendapatkan KIP Kuliah.

Setelah di tetapkan nama-nama calon mahasiswa Penerima KIP Kuliah pihak Rumah Aspirasi akan berkoordinasi dengan pihak Kampus untuk menentukan waktu dan tempat untuk Calon Mahasiswa Penerima KIP Kuliah akan mendaftar ke kampus masing-masing.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian. Maka, di dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan ?
2. Apa saja Faktor-Faktor Pendukung & Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Kuliah Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan.
2. Untuk menganalisis Apa saja Faktor-Faktor Pendukung & Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori tentang kebijakan pendidikan tinggi, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan melalui beasiswa KIP Kuliah.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian lain yang ingin mengkaji efektivitas program KIP Kuliah di berbagai jalur penerimaan.
- c. Memberikan wawasan akademik tentang bagaimana kebijakan dalam pendidikan dapat diterapkan dan dampaknya terhadap mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang bagaimana KIP Kuliah Jalur Aspirasi dapat membantu pembiayaan pendidikan
- b. Meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai penerima KIP Kuliah
- c. Menggunakannya sebagai sumber evaluasi untuk meningkatkan proses pengambilan dan pelaksanaan KIP Kuliah Jalur Aspirasi
- d. Membantu universitas dalam membuat kebijakan yang lebih melibatkan orang dan mendukung siswa penerima KIP Kuliah agar lebih berprestasi
- e. Memberikan data empiris tentang seberapa efektif program KIP Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi orang-orang yang kurang mampu
- f. Menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan KIP Kuliah di masa depan
- g. Memberikan pemahaman tentang pentingnya program ini dalam membantu siswa yang kurang mampu mendapatkan pendidikan tinggi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Secara etimologis konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal (*syclical theory*), maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang - undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Jadi dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang - undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Larimer (2009: 134).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 135), merumuskan proses implementasi sebagai "tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individual pejabat - pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan"

Van Meter dan Van Horn (1975: 135) ada 7 (tujuh) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya Kebijakan

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya manusia.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam Implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu perlu koordinasi dan kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma - norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejahtera mana kelompok - kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan Badan Pelaksana

Kecenderungan Badan Pelaksana ini mencakup tiga hal, yakni: a) Respon implementator terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, b) Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan c) Intensitas disposisi implementor yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

7. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*) dan ketiga intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979: 135), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian - kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman - pedoman kebijakan publik kebijakan publik yang mencakup baik usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian".

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete (Hill and Hupe 2002). Dalam KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait. Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan.

Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Van Meter dan van Horn (dalam Winarno 2007) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan - keputusan kebijakan.

2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan Kata kebijakan (Policy) itu sendiri, menurut Bernard Schaffer dikutip Ino Sutisna Rawita (2013 : 9), kebijakan mempunyai tiga makna. Pertama, kebijakan mengacu kepada tujuan - tujuan yang diasosiasikan orang dengan polis. Makna kedua, berkaitan dengan tinjauan informasi dan determinasi tindakan yang sesuai. Makna

ketiga, berkaitan dengan pengamanan dan komitmen sumber daya. Sedangkan menurut Amara Raksasa Taya, sebagaimana dikutip Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara Budiardjo dalam Ino Sutisna Rawita (2013:15), mendefinisikan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan - tujuan dan cara - cara untuk mencapai tujuan - tujuan tersebut. Jadi, Menurut definisi tersebut pihak yang menyusun kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri - sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu Negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Konsep ini menunjukkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik seharusnya di tujukan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (1984) (Widodo, 2009) yaitu :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Denhardt dan denhardt (2003) administrasi publik adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan peranan badan-badan dalam suatu pemerintah dan juga hubungan badan-badan tersebut, dimana kebijakan pemerintah. Padangan tersebut mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Eystone (1971:18) (dalam Wahab, 2012) bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintah dengan lingkungannya. Demikian pula pernyataan Wilson (2006) yang merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan pemerintah

mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah telah/sedang diambil untuk diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program pemerintah. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Program-program pemerintah pada hakekatnya bersifat (top-down) yaitu perintah mulai dari pimpinan hingga jajaran staf paling bawah hal ini dapat di ilustrasikan dalam program pemerintah yaitu pelayanan kartu penduduk, pelayanan akta kelahiran dan pelayanan akta kematian. Hal ini bertujuan untuk mendata warga negara indonesia di seluruh Nusantara, baik yang ada di pedesaan maupun daerah perbatasan Negara.

Kedudukan implementasi kebijakan sangat penting dalam proses kebijakan sebagaimana pandangan. Mazmanian dan Sabatier (1979), (dalam Wahab (2008) implementasi kebijakan adalah "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah ssuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat. Implementasi kebijakn dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, Peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

2.5 Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Pemerintah telah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang sebelumnya dikenal sebagai Bidikmisi, untuk membantu siswa yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia meluncurkan program ini dengan harapan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi, yang akan membantu memecahkan rantai kemiskinan.

Program Bidikmisi, yang telah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2011, berkembang menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang merupakan program bantuan sosial untuk siswa di perguruan tinggi. Tujuan KIP Kuliah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi anggota masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara finansial.

Pada tahun 2021, Program Bidikmisi diubah menjadi KIP Kuliah, dan pada tahun 2022, KIP Kuliah menjadi KIP Kuliah Merdeka. Perbedaan utama antara kedua program tersebut terletak pada jumlah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah. KIP Kuliah menerima Bantuan Biaya Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp 2,4 juta per semester, sedangkan KIP Kuliah Merdeka tidak menerima sama sekali.

Diketahui bahwa KIP Kuliah Merdeka memberikan bantuan UKT yang disesuaikan dengan program studi yang dipilih, serta akreditasi Prodi. Bantuan dengan akreditasi Prodi C dapat mencapai maksimal 2,4 juta rupiah, akreditasi B dapat mencapai 4 juta rupiah, dan akreditasi A dapat mencapai maksimal 12 juta rupiah.

Sebaliknya, biaya berikut tidak termasuk dalam tanggungan KIP:

- a. Jas Almamater atau pakaian praktikum
- b. Asrama
- c. Biaya untuk mendukung KKN, PKL, atau magang
- d. Biaya untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilakukan secara mandiri
- e. Biaya wisud

2.5.1 Syarat KIP Kuliah

Meskipun terbuka untuk semua calon mahasiswa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat memperoleh KIP Kuliah. Sehubungan dengan proses pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2023, syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh calon pendaftar:

- a) Penerima KIP Kuliah adalah siswa sekolah menengah atas atau sederajat yang telah lulus pada tahun berjalan atau 2 (dua) tahun sebelumnya
- b) Penerima KIP Kuliah harus memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki kendala keuangan yang didukung oleh bukti dokumen yang sah
- c) Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, dan mungkin pada Prodi dengan Akreditasi C dengan beberapa pertimbangan.

Jika seseorang ingin menerima KIP Kuliah, mereka harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang merupakan bagian dari program bantuan pendidikan nasional. Berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), siswa dari panti sosial atau panti asuhan,

dan siswa dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Selain itu, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu persyaratan di atas, mereka masih dapat mendaftar dengan catatan memenuhi persyaratan tertentu atau dengan melampirkan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah. Dalam kasus ini, persyaratan ekonomi tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang dapat dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali pembantu.

2.5.2 Cara Mendaftar KIP Kuliah

Untuk memulai pendaftaran, ikuti langkah-langkah berikut:

- A. Masuk ke situs web resmi <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id>.
- B. Setelah mendaftar, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan benar dan isi alamat email yang aktif.
- C. Jika NIK atau NISN tidak valid, calon mahasiswa harus segera melapor ke Dukcapil atau ke sekolah untuk memperbaikinya. Selain itu, mereka dapat melakukan verval mandiri ke Dapodik melalui situs web resmi <http://pd.data.kemdikbud.go.id>
- D. Jika NIK dan NISN calon mahasiswa benar dan terdaftar, mereka akan dikirim nomor pendaftaran dan kode akses melalui alamat email saat pendaftaran akun. Nomor pendaftaran dan kode akses ini akan digunakan untuk masuk dan mendaftar KIP Kuliah. Calon mahasiswa dapat menyelesaikan proses pendaftaran dengan jalur seleksi yang mereka pilih.

- E. Seseorang akan menerima kartu pendaftaran peserta KIP Kuliah setelah proses pendaftaran selesai. Kartu ini hanya menunjukkan bahwa calon mahasiswa telah mendaftar sebagai calon penerima KIP Kuliah.
- F. Calon mahasiswa dapat mengakses sistem KIP Kuliah secara berkala untuk mengetahui proses selanjutnya.

2.5.3 Jangka Waktu Pemberian KIP Kuliah

Beasiswa biasanya memiliki batas waktu. Ini dibuat untuk mendorong siswa untuk menyelesaikan pelajaran tepat waktu. Untuk masing-masing jenjang pendidikan, KIP diberikan dalam waktu berikut: Sarjana maksimal 8 semester, Diploma 4 tidak melebihi 8 semester, Diploma 3 tidak melebihi 6 semester, dan Diploma 2 tidak melebihi 4 semester.

2.5.4 Keunggulan KIP Kuliah

Manfaat KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Membebaskan biaya pendaftaran Selesi Masuk SNBT dan seleksi mandiri yang ditawarkan oleh masing-masing perguruan tinggi;
- b. Biaya Kuliah Gratis Sampai Lulus, yang disesuaikan dengan akreditasi program studi; dan
- c. Biaya kuliah gratis setelah lulus.

Mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka yang terpilih akan menerima bantuan biaya hidup sebesar 950 ribu setiap enam (enam) bulan sekali. Bantuan ini sepenuhnya merupakan hak mahasiswa dan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Mahasiswa dapat menggunakan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka selama kuliah. Bantuan ini tidak boleh digunakan oleh perguruan tinggi untuk tujuan apa pun.

2.5.5 KIP Kuliah Jalur Aspirasi

Salah satu cara untuk mendapatkan bantuan biaya kuliah dari pemerintah adalah dengan menggunakan KIP Kuliah Jalur Aspirasi. Di jalur aspirasi, bantuan diberikan melalui perantara, seperti anggota legislatif atau tokoh masyarakat. Ini berbeda dengan jalur biasa.

- a. KIP Kuliah Jalur Aspirasi dan KIP Kuliah Reguler memiliki tujuan yang sama: membantu siswa yang kurang mampu secara finansial mengakses pendidikan.
- b. Cara mendaftarnya berbeda: KIP Kuliah Reguler mendaftar sendiri, sementara KIP Kuliah Aspirasi mendaftar melalui perantara.
- c. Syarat-syaratnya tetap sama: mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ditemukan, seperti memiliki potensi akademik yang baik dan berasal dari keluarga miskin.

Tujuan KIP Kuliah Jalur Aspirasi adalah untuk membantu lebih banyak siswa. Adanya jalur aspirasi diharapkan dapat membantu mahasiswa yang mungkin belum tahu atau kesulitan mendapatkan informasi tentang KIP Kuliah. Jika Anda sudah mendaftar di Jalur Aspirasi, itu bukan jaminan Anda akan diterima. Syarat dan ketentuan yang berlaku akan digunakan untuk menilai semua tetap. Karena proses pemilihannya harus transparan dan adil, KIP Kuliah Jalur Aspirasi ini transparan dan adil. Tidak boleh ada tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

2.5.6 Rekomendasi Untuk Mendapatkan KIP Kuliah

Agar peluang mendapatkan KIP Kuliah lebih besar, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Memahami Syarat dan Kriteria
2. Sebelum menerima KIP Kuliah, pastikan penerima memenuhi syarat berikut:
 - a. Berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang dapat dibuktikan dengan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika tidak terdaftar di DTKS.
 - Diterima di Perguruan Tinggi melalui Jalur Aspirasi, yang biasanya merupakan seleksi mandiri yang dilakukan oleh kampus melalui rekomendasi dari tokoh masyarakat, lembaga, atau sekolah.
 - Memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang baik di sekolah menengah, SMA/SMK/MA.
3. Menemukan Informasi tentang Jalur Aspirasi di Universitas Tujuan:
 - a. Cari tahu di website dan media sosial universitas apakah mereka menyediakan jalur aspirasi KIP Kuliah;
 - b. Hubungi bagian kemahasiswaan atau penerimaan mahasiswa baru universitas untuk mendapatkan informasi tentang produser
 - c. Berkonsultasi dengan pihak terkait di sekolah, seperti guru BK atau kepala sekolah, karena institusi pendidikan umumnya memiliki kemampuan untuk menyarankan siswa untuk berprestasi melalui jalur aspirasi.
4. Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan lengkap dan akurat, seperti
 - a. Kartu Keluarga (KK) dan KTP
 - b. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua

- c. Rekomendasi dari tokoh masyarakat atau sekolah jika diperlukan
 - d. Rapor SMA, SMK, atau MA dan sertifikat prestasi jika ada
 - e. Bukti kepemilikan KIP atau keterlibatan dalam program bantuan sosial lainnya.
5. Mendaftar dengan Benar dan Tepat Waktu
- a. Daftar melalui sistem pendaftaran universitas yang membuka jalur aspirasi untuk KIP Kuliah
 - b. Pastikan mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menghindari kendala teknis
 - c. Isi data dengan benar dan jujur, karena ketidaksesuaian data bisa menyebabkan diskualifikasi
6. Menunjukkan Prestasi dan Motivasi yang Kuat Beberapa universitas mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik dalam seleksi Kip Kuliah Jalur Aspirasi. Oleh karena itu:
- a. Tunjukkan prestasi akademik atau ekstrakurikuler yang relevan
 - b. Siapkan esai atau surat motivasi yang menjelaskan alasan ingin kuliah dengan KIP dan bagaimana program ini akan membantu masa depanmu
 - c. Jika ada wawancara, persiapkan diri dengan baik, tunjukkan motivasi yang kuat untuk kuliah.

7. Mengikuti Seleksi dengan Serius:

- a. Ikuti semua tahapan seleksi universitas, termasuk verifikasi dokumen, wawancara, dan tes tambahan jika diperlukan.
- b. Tetap terinformasi tentang universitas sehingga Anda tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi.



2.6 Penelitian Terdahulu

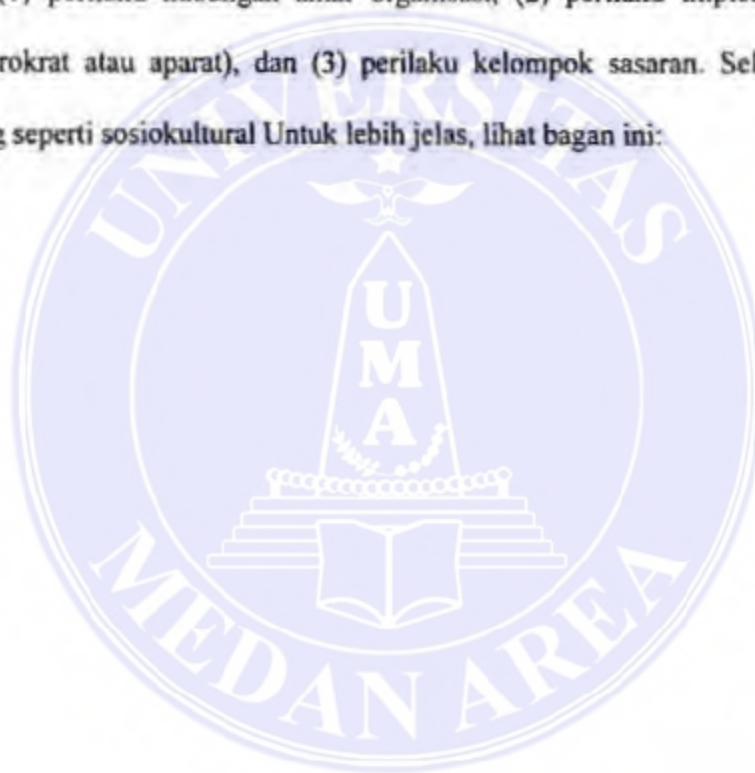
Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (Jurnal) diantaranya:

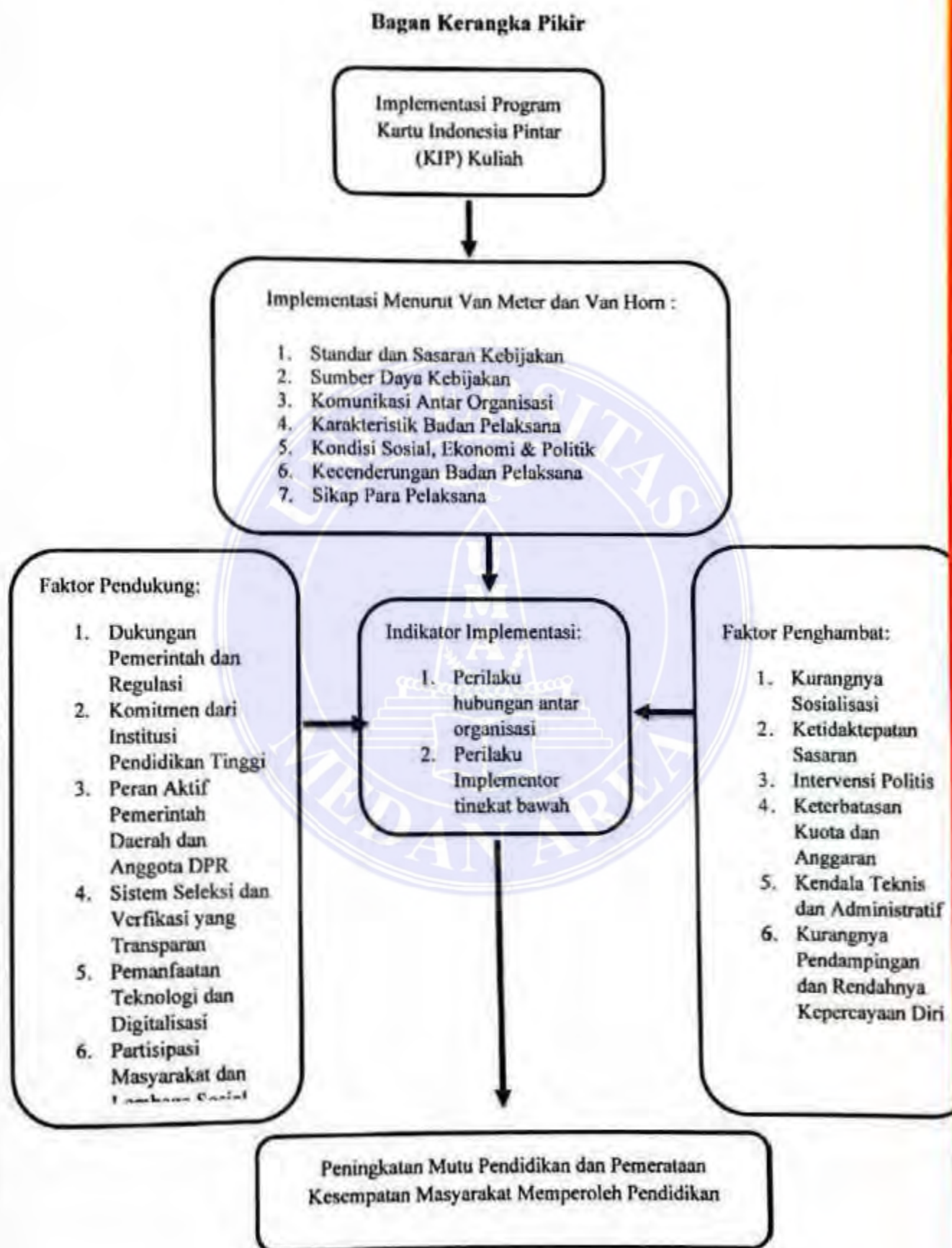
Tabel 2.7 Jurnal Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Umair	Pengaruh Program KIP-K dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan IPS Angkatan 2019-2021 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Metode Kuantitatif	Adanya Program KIP-K memberikan motivasi untuk mandiri dalam belajar agar bisa mendapatkan hasil belajar yang baik.
2	Reghitama Sucita	Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) Di Universitas Riau	Universitas Riau	Metode Kualitatif	Pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Program ini digunakan untuk meningkatkan kesempatan masuk dan belajar ke Perguruan Tinggi serta mempersiapkan penerus bangsa Indonesia yang berdaya saing dan cerdas. KIP-Kuliah dimaksudkan bisa memajukan kesejahteraan ekonomi keluarga yang terbatas dan meminimalkan pengangguran di masa mendatang.

2.7 Kerangka Pemikiran

Program tersebut mendukung pelaksanaan KIP Kuliah yang diterapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, peneliti ingin menentukan keberhasilan implementasi program KIP Kuliah di Universitas Mandiri Bina Prestasi dengan membuat model implementasi kebijakan yang melibatkan tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program: (1) perilaku hubungan antar organisasi, (2) perilaku implementor tingkat bawah (birokrat atau aparat), dan (3) perilaku kelompok sasaran. Selain itu, faktor pendukung seperti sosiokultural. Untuk lebih jelas, lihat bagan ini:







UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai November, Sesuai dengan waktu dan tempat penelitian yang telah ditentukan, penelitian dilakukan di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan dengan alamat Jl. Jamin Ginting No. 285 - 287, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20165.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki berbagai jenis yang dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu dengan pendekatan mendalam dan kontekstual.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, situasi, atau kejadian secara sistematis dan akurat. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data untuk menjelaskan "apa yang terjadi" tanpa memengaruhi atau memanipulasi variabel yang diamati.

Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015: 52), Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang

spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Peneliti ingin mempelajari perspektif, pengalaman, atau makna yang dimiliki individu atau kelompok tertentu tentang fenomena tertentu. Penelitian kualitatif memberikan fleksibilitas untuk memahami fenomena dalam konteks sosial, budaya, atau lingkungan tertentu. Metode ini cocok untuk mengeksplorasi atau fenomena yang belum terdefinisi sehingga membantu membangun pemahaman awal atau mengembangkan teori baru. Metode kualitatif memungkinkan penelitian yang memfokuskan pada dinamika hubungan atau proses yang berlangsung.

Penelitian ini memberikan data berupa narasi, deskripsi, atau dokumen yang lebih rinci dibandingkan data numerik, sehingga mampu menangkap detail fenomena secara lebih lengkap. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian dapat berkembang seiring proses pengumpulan data, memungkinkan penyesuaian berdasarkan temuan awal. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan mendalam tentang suatu fenomena, bukan sekedar hasil statistik atau generalisasi dan untuk memahami fenomena secara menyeluruh, termasuk berbagai faktor yang mempengaruhinya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan/sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, peraturan - peraturan dan sumber-sumber tertulis.

Menurut Arikunto (2013) dalam buku "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" menjelaskan bahwa kepustakaan adalah sumber informasi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kepustakaan tidak hanya membantu menjelaskan teori, tetapi juga berfungsi sebagai pembanding atau sumber data primer dalam penyusunan analisis.

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang teori-teori saat ini, mengetahui hasil penelitian sebelumnya, dan membangun kerangka teoritis yang kuat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Menemukan sumber yang relevan; pilih buku, artikel, jurnal, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.
2. Membaca dan menganalisis materi yang ditemukan dengan cermat, dan pertimbangkan apakah informasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih dalam atau membantu menjelaskan fenomena yang diteliti.
3. Mencatat referensi yang relevan untuk digunakan dalam landasan teori atau pembahasan penelitian.

4. Membangun kerangka teori berdasarkan studi pustaka, membuat kerangka teori yang akan menjadi dasar penelitian. Hal ini akan membantu membangun argumen dan memperkuat analisis penelitian.

b. Observasi

Menurut Nasution (1998: 64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda - benda yang sangat kecil (proton dan eletron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) data diobservasi dengan jelas. Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin di teliti, yaitu Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan mengenai Program KIP Kuliah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan saat melakukan observasi:

1. Tentukan topik utama yang akan diamati, seperti perilaku individu, interaksi kelompok, atau dinamika sosial dalam situasi.
2. Pilih setting atau lokasi yang tepat untuk melakukan observasi, seperti ruang kelas, ruang kerja, atau komunitas.
3. Siapkan alat untuk mencatat hasil observasi; ini dapat berupa buku catatan, video, atau alat lainnya.
4. Untuk menangkap kejadian secara akurat, lakukan pengamatan dengan teliti sesuai dengan fokus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Catat secara sistematis perilaku, interaksi, atau situasi yang relevan setelah pengamatan.

Salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru adalah KIP Kuliah Jalur Aspirasi, yang memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini dirancang untuk mendukung mereka yang memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan.

Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan melihat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan program KIP Kuliah. Yang paling menonjol adalah bagaimana mahasiswa penerima KIP Kuliah dipilih, dibantu, dan diawasi.

Proses pendaftaran mahasiswa calon penerima KIP Kuliah:

1. pengumpulan dokumen, verifikasi kelayakan, dan seleksi administrasi Observasi ini penting untuk memastikan proses seleksi transparan dan tepat sasaran, dan memberikan peluang yang adil bagi siswa yang memiliki potensi tetapi memiliki sumber daya keuangan yang terbatas.
2. Sosialisasi kepada calon mahasiswa tentang program KIP Kuliah melalui Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan atau media komunikasi yang disediakan oleh Universitas. Ini penting untuk memberi tahu calon penerima manfaat tentang cara mendaftar, persyaratan, dan keuntungan yang akan diterima. Hal ini juga memastikan bahwa calon siswa lebih menyadari jalur seleksi ini.
3. Pendampingan yang diberikan oleh pihak Universitas selama proses seleksi, termasuk bimbingan mengenai cara mengisi formulir pendaftaran atau menyusun dokumen yang dibutuhkan. Observasi ini mengidentifikasi sejauh mana Universitas memberikan bantuan bagi calon mahasiswa untuk memastikan mereka dapat mengikuti proses seleksi dengan lancar, tanpa hambatan

administratif yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah.

4. Pengelolaan dana yang diberikan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah, termasuk penyaluran dana untuk biaya kuliah, biaya hidup atau kebutuhan akademik lainnya.

Observasi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima mahasiswa dapat digunakan sesuai dengan tujuan, serta pengelolaan dana dilakukan dengan transparan dan efisien. Mahasiswa yang menerima KIP Kuliah menerima pendampingan akademik yang mencakup kelas tambahan, bimbingan belajar, atau mentoring yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan akademik mereka. Program pendampingan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan tinggi yang mungkin memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya.

Penerima KIP Kuliah Tujuan program pengembangan diri adalah untuk membantu siswa mempersiapkan diri secara menyeluruh, baik dari segi akademik maupun keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Proses monitoring terhadap kemajuan akademik mahasiswa penerima KIP Kuliah termasuk evaluasi terhadap prestasi belajar mereka, tingkat kehadiran, dan partisipasi dalam kegiatan akademik. Observasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa penerima KIP Kuliah juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mencapai hasil akademik yang memadai, serta untuk mengetahui apakah ada hambatan yang dihadapi mereka dalam mengikuti perkuliahan. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi kemahasiswaan, olahraga, seni atau kegiatan sosial yang membantu dalam

pengembangan keterampilan non-akademik mereka. Observasi ini penting untuk melihat sejauh mana mahasiswa dapat mengembangkan diri mereka secara keseluruhan, berinteraksi dengan teman seangkatan, dan mengasah keterampilan sosial serta kepemimpinan mereka.

Program pendampingan karir di universitas membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar kerja setelah lulus dari sekolah. Program ini termasuk pelatihan wawancara kerja, pemahaman tentang tren industri yang relevan dengan jurusan yang mereka pilih, dan bimbingan tentang dunia kerja. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka.

Mengukur dampak program Kip Kuliah terhadap keberhasilan akademik dan perkembangan pribadi siswa. Observasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar dampak program ini terhadap prestasi akademik siswa dan sejauh mana mereka dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi sebagai hasil dari bantuan yang mereka terima dari program ini.

c. Wawancara

Menurut Ester (2002: 316) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara ini teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan atau responden untuk menggali informasi mendalam mengenai suatu topik atau pengalaman tertentu.

1. Tentukan tujuan wawancara, seperti pengalaman responden, perspektif, atau perasaan tentang masalah.
2. Buat pertanyaan yang relevan dengan tujuan wawancara. Untuk memberi peserta kesempatan untuk berbicara lebih bebas, pertanyaan yang lebih umum dapat digunakan selama wawancara.
3. Memilih responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau perspektif yang terkait dengan subjek penelitian.
4. Melakukan wawancara dengan penuh perhatian, dengarkan dengan seksama dan berikan kesempatan kepada responden untuk menjelaskan jawaban mereka secara rinci.
5. Mencatat atau merekam jawaban response dengan izin mereka. Pastikan untuk mencatat poin-poin penting dan detail yang akan membantu dalam analisis data.
6. Setelah wawancara selesai, lakukan analisis terhadap data yang terkumpul untuk mencari tema, pola atau pemahaman yang lebih dalam.

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar dan mendalam, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam metode penertian wawancara KIP Kuliah. Penelitian wawancara ini dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

1. Sebelum memulai wawancara, pastikan penelitian Anda memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, tujuan penelitian dapat berupa mengetahui bagaimana mahasiswa penerima KIP Kuliah melihat manfaat program, masalah yang mereka hadapi, atau bagaimana mereka mempersiapkan program untuk berhasil.
2. Persiapkan semua hal yang berkaitan dengan wawancara, termasuk membuat pertanyaan, memilih informan, dan menentukan waktu dan lokasi wawancara.

3. Memilih informan yang relevan; informan dapat termasuk mahasiswa yang menerima KIP Kuliah, dosen, dan orang yang mengelola program KIP Kuliah di Universitas.
4. Melakukan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah disepakati untuk memastikan bahwa wawancara berjalan lancar dan mengumpulkan data yang diperlukan. Data ini dapat berupa transkrip wawancara.
5. Setelah wawancara selesai, rangkum hasilnya untuk memudahkan analisis data.
6. Setelah data dikumpulkan, lakukan analisis untuk menemukan tema dan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Gunanya untuk menentukan tema utama wawancara, seperti perasaan positif atau negatif siswa tentang program KIP Kuliah.
7. Integrasikan hasil wawancara dengan teori atau kerangka penelitian yang digunakan.
8. Menulis laporan penelitian yang mencakup tujuan, metodologi, dan kesimpulan wawancara setelah analisis selesai. Mengumpulkan hasil yang jelas dan didukung oleh kutipan langsung dari wawancara, serta melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana temuan mendukung atau menentang teori saat ini.
9. Berdasarkan hasil wawancara, membuat kesimpulan tentang program KIP Kuliah dan bagaimana hal itu berdampak pada siswa. Beri saran kepada universitas atau pihak terkait lainnya tentang cara memperbaiki program untuk membantu siswa penerima manfaatnya.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 326) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar. Misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

Langkah-langkah yang harus dilakukan selama wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menemukan sumber dokumentasi yang relevan dengan penelitian: arsip, laporan resmi, foto, video, catatan sejarah, atau dokumen kebijakan.
2. Mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan.
3. Teliti menganalisis isi dokumen dan informasi untuk menemukan bukti untuk penelitian. Ini bisa berupa fakta, statistik, narasi, atau kebijakan yang terkait dengan topik penelitian.
4. Menggunakan analisis dokumen untuk membuat kesimpulan, rangkum kesimpulan tersebut, dan gabungkan kesimpulan tersebut dengan data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Proses memilih informan sangat penting dalam penelitian kualitatif karena kualitas informasi yang diperoleh sangat bergantung pada kualitas informan yang

dipilih. Oleh karena itu, ada pedoman atau standar yang harus diikuti saat memilih informan agar data yang diperoleh relevan dan mendalam.

Informan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang terkait dengan subjek atau fenomena yang diteliti. Misalnya, dalam penelitian tentang KIP Kuliah, informan dapat terdiri dari mahasiswa yang menerima KIP Kuliah, pejabat yang terlibat dalam KIP Kuliah, atau dosen yang memberikan dukungan akademik. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, informan yang memiliki pengalaman langsung dengan fenomena atau masalah yang diteliti akan memberikan wawasan yang lebih dalam. Pengalaman dan keahlian informan sangat penting untuk mendapatkan informasi yang relevan. Karena salah satu cara untuk menggali informasi secara komprehensif adalah melalui wawancara atau diskusi yang mendalam, informan yang mampu memberikan jawaban yang mendalam dan terperinci lebih disukai dalam penelitian kualitatif.

1) Rektor Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan

Sebagai pimpinan tertinggi universitas, rektor bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan program KIP Kuliah.

- Menetapkan kebijakan universitas tentang pelaksanaan KIP Kuliah, termasuk menentukan mekanisme penerimaan mahasiswa melalui jalur ini.
- Mengawasi implementasi program agar sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebijakan internal universitas.

- Berkomunikasi dengan Rumah Aspirasi dr. Sofyan Tan dan Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa jalur Aspirasi mendapatkan dukungan penuh.
- Secara berkala menilai keberhasilan program, termasuk tingkat keberhasilan.

2) Sumber Informasi Utama:

a) Wakil Rektor II Bagian Kemahasiswaan

- bertanggung jawab atas pengelolaan dana program, termasuk memastikan bahwa dana beasiswa untuk mahasiswa KIP Kuliah dialokasikan dengan tepat sasaran
- Menjalankan prosedur penerimaan dan penyebaran bantuan untuk siswa jalur aspirasi, termasuk pelaporan anggaran kepada rektor dan pihak terkait.
- Merencanakan fasilitas tambahan yang mungkin dibutuhkan siswa penerima, seperti kursus pelatihan atau bimbingan akademik.

3) Komisi X DPR-RI (dr. Sofyan Tan)

Menyusun dan mengawasi kebijakan terkait pelaksanaan KIP Kuliah, termasuk alokasi anggaran nasional untuk mendukung program ini; memastikan bahwa jalur aspirasi dilaksanakan dengan benar; dan mencapai tujuan memberikan akses pendidikan tinggi kepada siswa kurang mampu.

- Mendukung universitas untuk menawarkan jalur aspirasi sebagai cara untuk memperluas penerimaan dalam program KIP Kuliah;
- Melakukan evaluasi nasional tentang seberapa efektif jalur aspirasi; dan
- Meminta perbaikan kebijakan berdasarkan saran masyarakat.

4) Biro Kemahasiswaan

Melaksanakan proses seleksi akademik dan administrasi mahasiswa yang mendaftar melalui jalur aspirasi; Menyebarkan informasi tentang program KIP Kuliah kepada masyarakat umum dan calon mahasiswa, termasuk persyaratan dan prosedur pendaftaran.

- Memberikan layanan pendampingan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah dalam hal akademik maupun non-akademik untuk memastikan kelancaran studi mereka
- Mengelola data penerima KIP Kuliah dan membuat laporan untuk Universitas, Rumah Aspirasi, dan Kementerian terkait

5) Sumber Informasi Tambahan, termasuk: Mahasiswa Penerima KIP Kuliah: Mengajukan permohonan melalui jalur aspirasi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan

- Menggunakan bantuan KIP Kuliah untuk kebutuhan akademik seperti buku, biaya kuliah, dan kebutuhan sehari-hari
- Menjaga prestasi akademik sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan, seperti mempertahankan IPK tertentu

- Mematuhi aturan administrasi universitas, Rumah Aspirasi, dan Kementrian, termasuk pelaporan penggunaan dana
- Melaporkan masalah program kepada biro kemahasiswaan untuk mendapatkan solusi

3.5 Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis data untuk mengorganisasi, mengkategorikan, dan menganalisis data yang mereka kumpulkan selama penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau makna dalam data sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang relevan dan menciptakan pertanyaan penelitian. Analisis data lebih eksploratif dalam penelitian kualitatif dan berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena.

Menurut Miles dan Huberman (2014: 246) analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, atau mengelompokkan data yang ada untuk menyingkirkan data yang tidak relevan atau kurang penting. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya sangat banyak dan beragam, sehingga penting untuk menyaring dan mengorganisir data agar analisisnya lebih mudah dan terarah.

Langkah-langkah dalam reduksi data adalah sebagai berikut:

1. Tentukan data mana yang relevan dengan fokus penelitian

2. Menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami
3. Mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu.

Salah satu tahap analisis data kualitatif adalah reduksi data, yang bertujuan untuk menyaring, memilih, dan memilah informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang tidak relevan atau berlebihan dihapus, sehingga hanya informasi penting dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang tetap ada. Sesuai dengan tahapan reduksi data, peristiwa berikut digunakan untuk memilih dan memilah data yang diperlukan:

- a. Mengorganisir dan mempersiapkan data setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumen; langkah pertama dalam reduksi data adalah mengorganisir data dengan baik.
- b. Baca secara menyeluruh semua data yang telah dikumpulkan untuk memahami kontennya, dan
- c. menggunakan pembacaan menyeluruh ini untuk membuat kategori atau tema awal yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Memilih data yang sesuai dengan kategori atau tema yang telah dibuat sebelumnya.
- e. Mengabaikan data yang tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian atau tema yang sedang diselidiki.
- f. Setelah data yang relevan disaring, langkah selanjutnya adalah menyusun data yang sudah terpilah dalam bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis

- g. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data yang sudah terpilah, analisis hubungan antar kategori yang telah dibuat.
- h. Setelah data terpilah dan disaring, langkah selanjutnya adalah menyusun hasil reduksi data, yang akan digunakan untuk analisis lanjutan.

Dengan menggunakan metode ini dalam penelitian KIP Kuliah Jalur Aspirasi, ingin mengetahui bagaimana mahasiswa merasakan proses pengambilan keputusan dan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan mereka. Proses reduksi data berikut dapat digunakan:

- i. Membaca wawancara siswa penerima KIP Kuliah secara keseluruhan, lalu menandai bagian-bagian yang berbicara tentang masalah administrasi, dampak program, dan proses seleksi;
- ii. Membagi pernyataan siswa berdasarkan topik yang relevan, seperti kesulitan akademik (misalnya, kesulitan mendapatkan informasi atau tidak memahami syarat); dan iii. Mempengaruhi akademik (misalnya, menjadi lebih gugup).
- iii. Memeriksa data yang tidak relevan, seperti kisah pribadi yang tidak relevan dengan topik kuliah dan data berulang,
- iv. Menyusun data sesuai tema untuk menemukan pola penting yang terkait dengan topik penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan atau mengambil tindakan. Pengumpulan data ini membantu penulis memahami apa yang terjadi dan mendorong mereka untuk melakukan analisis atau tindakan lebih lanjut

berdasarkan apa yang mereka ketahui. Menyusun dan mengorganisir data yang sudah direduksi menjadi bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami disebut penyajian data. Tujuan penyajian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas sehingga peneliti dapat lebih mudah menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Ada banyak bentuk penyajian data, seperti diagram, table grafik, atau narasi deskriptif. Langkah-langkah penyajian data:

1. Data yang telah dipilih dan dikategorikan disusun secara sistematis dan disusun dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis.
2. Kadang-kadang, data disajikan dalam bentuk tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan peneliti melihat hubungan antar kategori atau tema.
3. Penyajian naratif; Dalam banyak kasus, hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk narasi atau cerita yang menceritakan hasil utamanya.

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk memilih dan menyajikan data yang relevan dan mendukung hasil penelitian. Data harus menggambarkan dengan jelas fenomena yang diteliti dan mendukung pemahaman atau analisis peneliti. Jenis data berikut dianggap penting untuk disajikan saat menyediakan data penelitian kualitatif:

- A. Data Utama (data yang langsung terkait dengan penelitian); potongan wawancara yang mengungkapkan perspektif, pengalaman, atau perasaan informan tentang subjek penelitian; contohnya, kutipan langsung dari informan tentang kesulitan atau pengalaman mereka mendapatkan bantuan melalui KIP Kuliah; atau catatan lapangan yang menggambarkan interaksi, perilaku, atau situasi yang diamati selama penelitian. Hal ini dapat termasuk

peristiwa, lingkungan, atau tindakan penting. Dokumen atau arsip yang relevan, seperti laporan, kebijakan, atau surat keputusan yang berkaitan dengan topik penelitian. Misalnya, dokumen resmi universitas tentang KIP Kuliah atau proses seleksi jalur aspirasi.

- B. Kutipan Langsung dari Informan: Memberikan bukti empirik yang kuat tentang fenomena yang diteliti dengan mengutip pernyataan langsung dari informan. Kutipan ini membantu menggambarkan perspektif individu dan memberikan konteks yang lebih kaya. Memberikan contoh konkrit dari pengalaman atau cerita yang relevan yang dapat menggambarkan tema atau pola yang ditemukan dalam data.
- C. Tema dan Kategori: Data dikelompokkan menjadi tema atau kategori besar yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, tema tentang masalah administrasi yang terkait dengan pengajuan KIP Kuliah atau tema tentang dukungan sosial yang diterima oleh siswa yang menerima KIP. Pembagian lebih lanjut dari tema besar memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek fenomena yang diteliti.
- D. Pola atau Tren: Data yang menunjukkan tren atau pola yang muncul selama penelitian. Misalnya, apakah ada kecenderungan untuk mengetahui alasan mahasiswa memilih karir di KIP Kuliah atau apakah ada perubahan dalam cara mahasiswa melihat manfaatnya seiring waktu.
- E. Perbandingan dan Kontras: Data yang menunjukkan hubungan antara berbagai kelompok atau kategori. Misalnya, perbedaan antara siswa yang menggunakan KIP Kuliah melalui jalur aspirasi dan jalur reguler terkait

dengan kemudahan akses, keuntungan, atau masalah yang dihadapi. Membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada atau temuan penelitian lain untuk memberikan konteks yang lebih luas dan menjelaskan kesamaan atau perbedaan.

- F. Deskripsi Kontekstual: Deskripsi data memberikan gambaran tentang konteks tempat penelitian dilakukan; ini sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor kontekstual memengaruhi fenomena yang diteliti. Deskripsi tentang lingkungan fisik atau sosial tempat pengumpulan data juga dapat mempengaruhi cara data dikumpulkan dan dipahami.
- G. Observasi Non-Verbal: Data non-verbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh lainnya dapat sangat penting dalam penelitian yang melibatkan observasi untuk menunjukkan perasaan atau reaksi yang mungkin tidak diungkapkan secara verbal.
- H. Grafik, Diagram, atau Tabel Menampilkan data dalam bentuk grafik, diagram, atau tabel untuk menunjukkan hubungan antara berbagai variabel atau tema. Visualisasi seperti ini dapat membantu menjelaskan persamaan atau perbedaan yang ditemukan dalam data kualitatif. Tabel atau diagram yang menggambarkan hubungan antar tema atau kategori yang ditemukan selama analisis. Hal ini bisa membantu pembaca untuk melihat dengan jelas struktur dan interaksi antar berbagai elemen data.
- I. Pernyataan dari Informan atau Pihak Berwenang • Dalam beberapa penelitian, data dari pejabat atau pihak berwenang dapat memberikan

perspektif yang sangat penting, terutama jika mereka terlibat langsung dalam proses atau kebijakan yang sedang dianalisis (misalnya, pejabat universitas atau otoritas terkait KIP Kuliah)

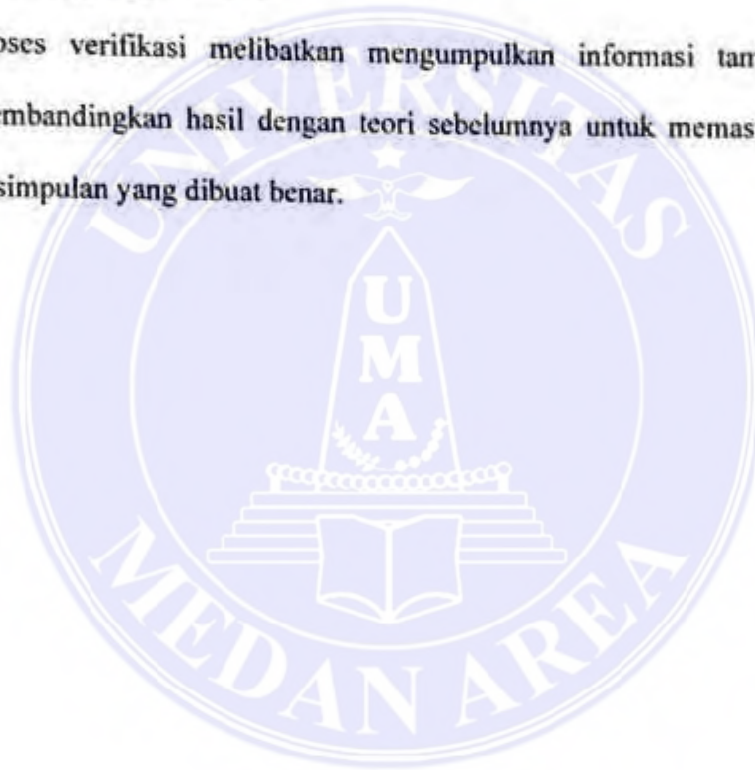
- J. Kontrol atau Variabel Lain; Penyajian data yang mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi hasil penelitian. Misalnya, faktor sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, atau pengalaman masa lalu yang bisa memberikan wawasan tambahan dalam memahami fenomena yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih jelas terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data yang melibatkan penafsiran dan pemahaman mendalam terhadap data yang telah diproses. Pada tahap ini, peneliti mulai menarik temuan atau kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan sesuai dengan data yang ada. Proses ini bisa berulang, dimana peneliti terus memverifikasi dan mengevaluasi temuan-temuan yang muncul sepanjang penelitian.

Langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi:

1. Menyusun kesimpulan awal berdasarkan data yang telah dianalisis dan disajikan, dan peneliti mulai menyusun kesimpulan yang mengarah pada jawaban atas pertanyaan penelitian.
2. Memeriksa hasil untuk memastikan apakah kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang telah disajikan dan apakah temuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
3. Proses verifikasi melibatkan mengumpulkan informasi tambahan atau membandingkan hasil dengan teori sebelumnya untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat benar.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi program KIP Kuliah jalur aspirasi Komisi X DPR-RI telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Program ini telah memberikan manfaat bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, dan menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan, seperti proses administrasi yang belum efisien, serta kurangnya informasi yang jelas terkait prosedur pendaftaran dan penyaluran dana. Pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagian mahasiswa penerima mengaku kurang memahami proses seleksi, kriteria penerima, serta prosedur lanjutan setelah menjadi penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam aspek komunikasi dan koordinasi antara pihak kampus, mahasiswa dan Komisi X DPR-RI.

Secara umum, implementasi program belum dapat dikatakan sepenuhnya bagus. Meskipun tujuan utama program yaitu membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan sudah mulai tercapai, namun dari sisi efektivitas, efisiensi, dan pemerataan penerima, pelaksanaan program ini masih perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih merata dan tepat sasaran.

2. Terkait dengan faktor-faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah dan Komisi X DPR-RI dalam menyediakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk upaya pemerataan akses pendidikan tinggi. Antusiasme mahasiswa yang cukup tinggi terhadap

program ini, terutama bagi mereka yang memang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Dukungan pihak kampus yang turut memfasilitasi proses administrasi, pendataan, serta pengumpulan dokumen mahasiswa penerima program. Kemudahan akses informasi digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui informasi program secara online, meskipun masih belum merata. Sebaliknya dengan faktor-faktor penghambatnya seperti kurangnya sosialisasi yang merata kepada seluruh mahasiswa, menyebabkan sebagian mahasiswa tidak mengetahui adanya program tersebut atau merasa bingung dengan alur dan persyaratannya. Proses administrasi yang belum efisien seperti keterlambatan dalam verifikasi dokumen dan pencairan dana, sehingga mengganggu kelancaran studi mahasiswa. Minimnya koordinasi antara kampus dan pihak penyalur bantuan, yang berdampak pada ketidaksesuaian data penerima dan potensi tumpang tindih dengan bantuan lain. Keterbatasan kuota penerima yang membuat tidak semua mahasiswa kurang mampu bisa mendapatkan bantuan, meskipun memenuhi kriteria. Dengan demikian, implementasi program KIP Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu segera dibenahi agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal dan merata.

5.2 Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh terkait program KIP Kuliah Jalur Aspirasi, baik melalui media sosial, seminar, maupun forum

mahasiswa, agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh mahasiswa. Proses seleksi dan penetapan penerima program perlu dilakukan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa serta berdasarkan data yang valid. Pihak kampus dan Komisi X DPR-RI disarankan untuk membentuk tim khusus dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap permasalahan yang muncul dapat secara diatasi. Koordinasi antara kampus, pihak DPR, dan instansi pemerintah terkait perlu ditingkatkan untuk memperlancar alur komunikasi dan administrasi dalam pelaksanaan program. Selain bantuan finansial, mahasiswa penerima KIP Kuliah sebaiknya juga mendapatkan pendampingan akademik dan pengembangan keterampilan melalui pelatihan, bimbingan dan kegiatan kemahasiswaan.

2. Perlu adanya peningkatan intensitas dan cakupan sosialisasi program secara menyeluruh kepada seluruh mahasiswa, agar mereka memahami alur, manfaat, serta prosedur pendaftaran program secara jelas. Peningkatan koordinasi antara pihak kampus dan lembaga penyalur bantuan (Komisi X DPR-RI, Kemendikbudristek, dan instansi terkait), guna memastikan bahwa proses seleksi dan penyaluran bantuan berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan jadwal. Penyederhanaan prosedur administrasi dan digitalisasi layanan dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pendataan, verifikasi, dan pencairan dana sehingga mengurangi keluhan dari mahasiswa. Pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti

dengan solusi yang tepat. Perluasan kuota penerima bantuan serta penyempurnaan kriteria penerima, agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan tidak tertinggal dan mendapatkan kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anderson, James. 1984. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rinehart and Winston, cet. Ke 3.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Denhardt, JV., dan Robert B. Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving, not Steering*. London, England: M.E. Sharpe
- _____. 2007. *The New Public Service: Serving Not Steering (Expanded Edition)*. New York: M.E. Sharpe, Armonk.
- Dr. Syahrudin, S.E., M.Si. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava M
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____. 2009. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rawita, Ino Sutisno. 2020. *Teori Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methos)*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahad, Solichin Abduk. 2014. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

WEBSITE

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7163698/apa-itu-kip-kuliah-simak> pengertian-syarat-dan-cara-daftarnya

<https://glints.com/id/lowongan/kip-kuliah/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia

<https://www.umbp.ac.id/>

<https://karakterunsulbar.com/2020/01/22/bidikmisi-diganti-jadi-kip-kuliah-berikut-penjelasan-kampus/>

https://lib.stiaalgazali.ac.id/assets/uploads/ebook/Buku_Kebijakan_Publikcetak.pdf

<https://e-journal.uajy.ac.id/17621/3/TS157302.pdf>

JURNAL

Hill Michael and Peter Hupe. 2002. *Journal of Social Policy: Implementing Public Policy*, Vol.33:Issue-1.

Humaira, C. P., Ramadhani, I., Nurhasanah, I., Aziz, A. R. A., Soegema, A., & Supriyono, S. (2024). *Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Tantangan Dan Solusi dalam Mewujudkan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45314-45320.

Tandra, R., Liliyana, & Utin, N. H. (2022). *Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)-Kuliah Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 74-84.

Christy, E. N., Latifa, R., Purwatitisari, N., Prabowo, P. A. R., & Harmawan, B. N. (2024). *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 9(2), 134-141.

Amelia, F., Jarudin, J., & Husnita, L. (2023). *Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISA)*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18409-18413.

Sufni, N. (2024). *Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia*. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(2), 38-45.

SKRIPSI & TESIS

Lumban Gaol, Risma Mariva Tua. 2018. *Implementasi Kebijakan Bidikmisi Terhadap Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga*. Sibolga.

Pusea, Wina Apriliani. 2021. *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR*. Universitas Islam Negeri (UIN) Radem Intan Lampung. Lampung

Saprianto, Ringgo, dkk. 2023. *Implementas KIP Kuliah Pada Mahasiswa/i Universitas Palangkaraya*. Universitas Palangkaraya. Palangkaraya.

Sucita, Reghitama. 2021. *Implementasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Di Universitas Riau*. Universitas Riau. Riau.

Sartika. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Rompegading Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.

Sinulingga Octaviani, Lidya. 2018. *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi Pada UPT Samsat Medan Selatan)*. Samsat Medan Selatan. Medan.

Umair, Muhammad. 2022. *Pengaruh Program KIP-K Dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan IPS Angkatan 2019-2021 Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.



Lampiran Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Kunci : Rektor Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
(18 Oktober 2024; 12.30 Wib)

A. Standar dan Sasaran Kebijakan :

- 1) Apakah ada grand design/ standar yang ditetapkan universitas sebagai acuan dalam implementasi program KIP ?
- 2) Bapak/Ibu Rektor, seberapa jelas tujuan spesifik program KIP Kuliah Jalur Aspirasi di Universitas Mandiri Bina Prestasi? Bagaimana pihak Universitas mengukur keberhasilan program ini?
- 3) Apakah terdapat indikator kinerja kunci yang jelas untuk mengukur dampak program ini terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan mahasiswa?
- 4) Jelaskan sasaran dari kebijakan KIP yang ditetapkan oleh universitas ?

B. Sumber Daya Kebijakan :

- 1) Jelaskan anggaran yang mendukung implementasi kebijakan KIP di Universitas ?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan anggaran dan apakah Universitas telah melakukan upaya optimalisasi?
- 3) Bagaimana Universitas memastikan ketersediaan SDM
- 4) Jelaskan kompetensi SDM yang mengelola program ini?
- 5) Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas?

- 6) Jelaskan tupoksi DM dalam implementasi kebijakan KIP ?
- 7) Jelaskan fasilitas (sarana/prasarana) yang mendukung implementasi kebijakan KIP ?

C. Komunikasi Antar Organisasi :

- 1) Bagaimana Koordinasi Universitas Mandiri Bina Prestasi dengan Kementerian Pendidikan, Lembaga Pendanaan, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program ini?
- 2) Bagaimana koordinasi antara bidang yang ada di universitas Mandiri Bina Prestasi Medan yang bertugas dalam implementasi kebijakan ?
- 3) Apakah ada mekanisme yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah mengenai hak dan kewajiban mereka?

D. Karakteristik Badan Pelaksana :

- 1) Seberapa besar komitmen pimpinan Universitas terhadap keberhasilan program KIP Kuliah Jalur Aspirasi?
- 2) Apakah Universitas memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola program ini, baik dari segi administrasi maupun akademik?
- 3) Bagaimana sikap pelaksana terkait Tingkat kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan KIP ?

E. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik :

- 1) Bagaimana Universitas merespon kondisi sosial dan ekonomi mahasiswa penerima KIP Kuliah? Apakah ada program pendampingan khusus yang ditawarkan?

2) Apakah ada kendala politik yang mempengaruhi pelaksanaan program ini?

f. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan?



Lampiran Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Utama : Wakil Rektor II Bagian Kemahasiswaan

(18 Oktober 2024; 10.00 Wib)

A. Komunikasi Antar Organisasi :

- 1) Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pendidikan dan birokrasi Universitas dalam pelaksanaan KIP Kuliah Jalur Aspirasi?
- 2) Apakah ada kendala dalam komunikasi dan koordinasi tersebut?

B. Karakteristik Badan Pelaksana :

- 1) Bagaimana Bapak/ibu melihat kinerja biro kemahasiswaan dalam mengelola program KIP Kuliah Jalur Aspirasi?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini di tingkat Universitas?

C. Kecenderungan Badan Pelaksana :

- 1) Apakah ada upaya untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan KIP Kuliah Jalur Aspirasi?
- 2) Bagaimana evaluasi terhadap program ini dilakukan secara berkala?

D. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan?

Lampiran Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Utama : DPR-RI Bidang Pendidikan (dr. Sofyan Tan)

(30 Oktober 2024; 11.00 Wib)

A. Standar dan Sasaran Kebijakan :

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu menilai relevansi kebijakan KIP Kuliah Jalur Aspirasi dengan kondisi mahasiswa di Indonesia, khususnya di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengawasan pelaksanaan program ini di tingkat pusat?

B. Sumber Daya Kebijakan :

- 1) Apakah anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah Jalur Aspirasi sudah sesuai dengan kebutuhan?
- 2) Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan anggaran KIP Kuliah Jalur Aspirasi?

C. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik :

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu melihat dampak KIP Kuliah Jalur Aspirasi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia?
- 2) Apakah ada usulan perubahan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ini?

D. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi?



Lampiran Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN HASIL WAWANCARA
Dengan Informan Utama : Biro Kemahasiswaan
(18 Oktober 2024; 11.00 Wib)

A. Komunikasi Antar Organisasi :

- 1) Bagaimana mekanisme sosialisasi informasi KIP Jalur Aspirasi kepada mahasiswa?
- 2) Apakah ada kendala dalam berkomunikasi dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah?

B. Karakteristik Badan Pelaksana :

- 1) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses seleksi dan penyaluran dana KIP Kuliah Jalur Aspirasi?
- 2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program ini?

C. Kecenderungan Badan Pelaksana :

- 1) Apakah ada usulan perbaikan sistem dan prosedur yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mahasiswa penerima KIP Kuliah?

D. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan?

Lampiran Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN HASIL WAWANCARA

Dengan Informan Tambahan : Mahasiswa Penerima KIP Kuliah

(18 Oktober 2024; 13.35 Wib)

A. Standar dan Sasaran Kebijakan :

- 1) Seberapa besar manfaat yang kamu rasakan dari program KIP Kuliah?
- 2) Apakah ada kendala yang kamu hadapi dalam memperoleh bantuan KIP Kuliah?

B. Sumber Daya Kebijakan :

- 1) Apakah jumlah dana yang diterima sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama kuliah?
- 2) Apakah ada kendala dalam pencairan dana KIP Kuliah?

C. Komunikasi Antar Organisasi :

- 1) Apakah kamu merasa informasi yang diberikan terkait KIP Kuliah sudah cukup jelas?
- 2) Apakah ada saluran komunikasi yang mudah diakses untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait KIP Kuliah?

D. Apa faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Jalur Aspirasi Komisi X DPR-RI Bagi Mahasiswa Di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1

Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Kunci Bapak Dr. Sarman Sinaga, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 2

Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Utama Ibu Dr. Afridayanti Surbakti, S.E.,M.Si selaku Wakil Rektor II Bagian Kemahasiswaan
Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 3

Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Utama Bapak dr. Sofyan Tan selaku Anggota DPR-RI Komisi X
Bertempat di Kantor DPR-RI, Jakarta Selatan
Tanggal : 30 Oktober 2024



Gambar 4

Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Utama Bapak Jimmy Perangin-angin, M. Kom selaku Ka.Bag. Humas dan Kemahasiswaan
Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 5
Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Tambahan Maria Meilani Batubara
selaku Mahasiswa Penerima KIP Kuliah
Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 6
Dokumentasi setelah wawancara bersama Informan Tambahan Fauzi Pratama Harefa
selaku Mahasiswa Penerima KIP Kuliah
Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 7

Foto Bersama dengan Bapak Dr. Sarman Sinaga, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan dan Bapak Jimmy Perangin-angin, M. Kom selaku Ka.Bag. Humas dan Kemahasiswaan Bertempat di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 8

Dokumentasi Tampak Depan Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan Tanggal : 18 Oktober 2024



Gambar 9
Suasana di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal: 18 Oktober 2024



Gambar 10
Suasana Kelas Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal: 18 Oktober 2024



Gambar 11
Tempat pusat informasi di Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan
Tanggal : 18 Oktober 2024

SURAT PERJANJIAN

Pada Hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ yang beranda dengan ditandatangani

Nama lengkap **AISYAH**
 Program Studi **Sistem Informasi**
 Bertanda untuk dan atas nama dirinya sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

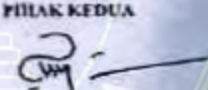
Nama lengkap **Irwanto Sembiring, ST., S.Kom., M.Pd**
 Jabatan **Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan Universitas MBP**
 Bertanda untuk dan atas nama Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK Pertama dan PIHAK Kedua mengadakan Perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak pertama diterima Kuliah pada program studi tersebut di atas pada Universitas Mandiri Bina Prestasi Medan melalui jalur beasiswa KIP KULIAH, dimana pihak pertama dibebaskan dari Uang Kuliah dan mendapat biaya hidup sebesar Rp. 950.000,-/bulan
2. Beasiswa yang di maksud adalah hanya UANG KULIAH
3. Pihak Pertama berkewajiban membantu pihak kedua dalam upaya pencarian dana dengan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan serta kasualitas untuk bersumber dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI).
4. Beasiswa yang diterima oleh pihak pertama hanya berlaku selama 4 (Tahun) tahun dengan ketentuan :
 - a. Pihak Pertama harus mampu mencapai Indeks Prestasi (IP) setiap semester minimal 3.00
 - b. Pihak pertama harus berketetapan baik (tidak mendapat Surat Peringatan)
 - c. Pihak pertama wajib aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan
 - d. Pihak pertama wajib mengikuti setiap upacara hari kebangsaan yang dilaksanakan oleh Universitas MBP.
 - e. Pihak pertama wajib mengikuti setiap rapat sosialisasi dan koordinasi yang diinlokasi dan diselenggarakan oleh pihak kedua
 - f. Pihak pertama tidak diizinkan menaruh selama masa kuliah berlangsung
5. Pihak pertama wajib membayar uang kemahasiswaan setiap tahunnya
6. Pihak pertama wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kampus
7. Pihak II berhak membatalkan beasiswa sebagaimana disebutkan dalam butir 2, bilamana Pihak I tidak mematuhi persyaratan seperti yang dimaksud pada butir 3 dan 4
8. Pihak I harus mengembalikan biaya pendidikan dan biaya hidup selama kuliah di Universitas MBP ke kas Negara RI, jika pihak ke II sudah membatalkan beasiswa dikarenakan tidak mematuhi persyaratan yang dimaksud pada butir 3 dan 4

Medan, 12 Oktober 2017

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**

AISYAH **Irwanto Sembiring, ST., S.Kom., M.Pd**

Orang tua/Wali **Diketahui**

SYARAH **ENVOIRE BINA PRESTASI ST., MM**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 102/E/O/2022

TENTANG

**IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER MEDAN DI KOTA
MEDAN DAN AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MEDAN
BUSINESS POLYTECHNIC DI KOTA MEDAN MENJADI UNIVERSITAS MANDIRI
BINA PRESTASI DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEDAN BUSINESS DAN POLYTECHNIC**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus
Yayasan Medan Business dan Polytechnic Nomor 118/YAS-
PA.Univ/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan surat Kepala
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor
31/LL1/KB.01.00/2020 tanggal 18 Desember 2020, perlu
memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer
Medan di Kota Medan dan Akademi Manajemen Informatika
dan Komputer Medan Business Polytechnic di Kota Medan
menjadi Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan di Kota Medan dan
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan
Business Polytechnic di Kota Medan menjadi Universitas
Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
yang Diselenggarakan oleh Yayasan Medan Business dan
Polytechnic;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);**

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER MEDAN DI KOTA MEDAN DAN AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER MEDAN BUSINESS POLYTECHNIC DI KOTA MEDAN MENJADI UNIVERSITAS MANDIRI BINA PRESTASI DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEDAN BUSINESS DAN POLYTECHNIC.

SATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Medan Business dan Polytechnic; dan
- b. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan Business Polytechnic di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Medan Business dan Polytechnic,

menjadi Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Medan Business dan Polytechnic di Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 17 Juni 2010 dan Akta Nomor 10 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3983.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya

Alsa, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0019217 tanggal 4 Agustus 2020.

KEDUA

- : Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- Sistem Informasi Program Sarjana;
- Teknik Informatika Program Sarjana;
- Teknik Informatika Program Diploma Tiga;
- Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
- Akuntansi Program Sarjana;
- Kewirausahaan Program Sarjana; dan
- Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana.

KETIGA

- : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

- : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e sampai dengan huruf g dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA

- : Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM

- : Ketua Pengurus Yayasan Medan Business dan Polytechnic wajib menyelenggarakan Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH

- : Apabila Universitas Mandiri Bina Prestasi di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan di Kota Medan dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan Business Polytechnic di Kota Medan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149/D/O/1999 tentang Pendirian Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan Business Polytechnic di Medan dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (Dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program DIII di Lingkungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan Business Polytechnic di Medan dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/D/O/2008 tentang Alih Kelola dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Universal yang Diselenggarakan oleh Yayasan Katholik Orthodox Indonesia di Medan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan di Kota Medan dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan Business Polytechnic di Kota Medan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
PIL. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pt. Sekuraris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjijik Sri Wahjandari
NIP 196502061988102001

